

**PEMIKIRAN BELA NEGARA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:
PERGESERAN PERAN NEGARA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERKEMBANGAN SUDUT PANDANG
STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**THE THINKING OF DEFENDING THE STATE
AND INTERNATIONAL RELATIONS : THE SHIFTING OF STATE'S ROLES
AND ITS IMPLICATIONS TO THE DEVELOPMENT OF
INTERNATIONAL RELATIONS STUDY'S POINT OF VIEW**

Syahrul Salam¹, Adi Rio Arianto², Rizky Hikmawan³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
(syahrul.salam@gmail.com, arianto.adirio@gmail.com, rizkyhikmawan@gmail.com)

Abstrak – Kemajuan teknologi, khususnya dibidang informasi, transportasi, dan sains, telah menciptakan evolusi peran negara sebagai aktor Hubungan Internasional (HI). Negara harus berbagi peran dengan aktor HI lainnya, seperti: organisasi internasional (OI), organisasi pemerintah/ non-pemerintah (IGOs/NGOs), kelompok epistemik, perusahaan multinasional (MNCs), dan individu. Pergeseran peran negara dalam usaha membela negara mengubah warna disiplin ilmu HI, yaitu pendekatannya. Kajian ini mendalami pergeseran peran negara dan implikasinya bagi sudut pandang HI, serta mengkaji evolusi lingkungan strategis. Hasil studi menemukan bahwa selain negara, universitas adalah salah satu calon aktor HI. Hal ini diidentifikasi melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) aspek bela negara menuntut peran sentral (mayor) dan peran sektoral (minor) negara sebagai subyek HI dimana negara berbagi peran dengan Universitas, (2) aspek bela negara mempengaruhi pendekatan Realisme dengan perilaku anarkisnya bergeser ke pendekatan alternatif: Horizontalisme dengan perilaku gotong-royongnya, (3) aspek bela negara menuntut perubahan lingkungan strategis dari Era Global (Globalisasi) ke Era Horizontal (Horizontalisasi) atau dengan istilah “Globalinium”, dan (4) aspek bela negara menjadi krusial saat disandingkan dengan kepentingan nasional di pentas Internasional.

Kata Kunci : bela negara, hubungan internasional, era horizontal, globalinium, negara, universitas

Abstract – The development of technological in the fields of information, transportation, and science, have created the evolution of the role of the state as an actor of International Relations (IRs). States should share roles with other IRs actors, such as international organizations (IO), government/ non-governmental organizations (IGOs / NGOs), epistemic groups, multinational corporations (MNCs), and individuals. The shifting role of the state in the effort to defend a state changed the color of the discipline of IRs, particularly in its approach. This study explores the shifting role of the state and its implications to IRs paradigm, and examines the evolution of the strategic environment. The results found that beside the “state”, the “university” can be one of the IRs actors. This is identified through the following four aspects: (1) the state defense aspect demands the major role and the minor role of the state as the subject of IRs in which the State shares its role with the university, (2) the state defense aspect affects the Realism approach with the anarchy shifts to alternative approaches: Horizontalism

¹ Peneliti dan Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, aktif mengajar seputar persoalan Politik Luar Negeri Indonesia.

² Peneliti dan Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, aktif mengajar seputar persoalan Strategi dan Keamanan Internasional.

³ Peneliti dan Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, aktif mengajar seputar persoalan Ekonomi Politik Internasional.

with its “gotong-royong”, (3) the state defending aspect demands a strategic environmental change from the Global Era (Globalization) to the Horizontal Era (Horizontalization) or with the term “Globalinium”, and (4) the state defending aspect were crucial when it juxtaposed with national interests on the international stage.

Keywords: state defending, international relations, horizontal era, globalinium, state, university

Pendahuluan

Tahun 2000, dunia memasuki Millennium Ketiga. Laju interaksi antarmanusia semakin tinggi. Kemajuan teknologi, khususnya dibidang informasi, transportasi, dan sains, telah menciptakan evolusi peran negara sebagai aktor Hubungan Internasional (HI). Negara kini harus berbagi peran dengan aktor lain, seperti: organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kelompok Epistemik, perusahaan multinasional, hingga individu. Dengan demikian, ruang lingkup Hubungan Internasional juga meningkat. Meningkatnya ruang lingkup HI juga turut mempengaruhi periodisasi sejarah dunia. Akhirnya, perubahan peran aktor HI—dalam hal ini negara—juga akan mengubah warna Disiplin Ilmu HI.

Hubungan bela negara dan Hubungan Internasional adalah tentang peran negara. Bela negara selalu dikaitkan dengan militer. Awalnya kewajiban membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Namun, berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara diminta untuk selalu berpikir, bertindak, berjuang dan berupaya membela negara. Negara perlu dibela agar tidak terancam oleh berbagai ancaman. Setiap warga negara harus

setiap saat mampu membela negara.

Negara memberikan keamanan dan kesejahteraan.⁴ Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri.⁵

Dalam UUD 1945 mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin memiliki peradaban yang unggul. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945.

⁴ Agus Subagyo, *Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Banten: Graha Ilmu, 2015).

⁵ Tohir, “Konsep Bela Negara Di Indonesia”, dalam <http://chyrun.com/konsep-bela-negara-di-indonesia/>, diakses pada 28 Januari 2017.

Perubahan peran negara juga mengubah karakter negara dan lingkungan strategiknya. Dengan demikian perlu untuk mendefinisikan lingkungan strategis abad ke-21 dan evolusinya. Tahun 2000 Masehi, dunia memasuki Milenium Ketiga, dan para Ilmuwan HI sedang mencari istilah paling strategis untuk menggambarkan lingkungan strategis yang sedang berjalan. Lebih dekat sebelum memasuki tahun 2000, Ekonom Theodore Levitt memperkenalkan lingkungan strategis HI dimana dunia sedang berada dalam Era Globalisasi. Ia menjelaskan tentang istilah kata “Globalisasi” melalui artikelnya yang berjudul “Globalization of Markets”. Artikel ini terbit di Harvard Business Review edisi Mei–Juni 1983.

Namun, makna kata dari “Globalisasi” sebelumnya sudah banyak digunakan (setidaknya sejak 1944) dan dipakai oleh beberapa Ilmuwan sejak 1981.⁶ Dalam istilah yang sedikit berbeda, istilah serupa, “Corporate Giants” (Raksasa Perusahaan), dicetuskan oleh Charles Taze Russell pada tahun 1897 yang pada akhirnya melahirkan ruang Globalisasi.⁷ Selanjutnya, tepat pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional (IMF) juga memperkenalkan lebih detail empat aspek dasar Globalisasi, yaitu: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan

⁶ Barnaby J. Feder, “Theodore Levitt, 81, Who Coined the Term ‘Globalization’, Is Dead”, 6 Juli 2006, diakses dalam <http://www.nytimes.com/2006/07/06/business/06levitt.html>, diakses pada 20 Agustus 2017.

⁷ Charles Taze Russell, “The Battle of Armageddon, October 1897 pages 365–370” (Oktober 1897), dalam <http://www.pastor-russell.com/volumes/V4/v04s07.php>, diakses pada 20 Agustus 2017.

perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Istilah Globalisasi menjadi trend dan mampu menjadi salah satu periodisasi sejarah waktu dalam studi HI.

Namun, perkembangan dari Era Globalisasi tidak berjalan lama, sebab, lingkungan strategis universal terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Jika, Levitt dan Organisasi Internasional seperti IMF mempersepsikan dunia melalui terminologi ekonomi, tentu saja hal ini tidak mampu mewakili secara keseluruhan. Beberapa Ilmuwan HI mendefinisikan ulang dunia dari beberapa aspek yang lebih komprehensif. Manfred B. Steger, seorang Profesor dari Universitas Hawaii, yang pernah menjabat sebagai *Director of the Globalism Research Centre*, mengkritik model lingkungan strategis Era Globalisasi.⁸ Dalam tulisannya “Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar”, Steger mencoba menggali lebih dalam tentang makna Globalisasi dalam lingkungan internasional. Hanya saja, pendekatan yang ia gunakan masih dalam ranah ekonomi. Usahanya untuk mengkritisi situasi ini perlu dihargai. Argumennya mengangkat tiga sektor inti, yaitu teknologi, ekonomi, dan konfigurasi ideology. Ia mengkritik klaim Globalis yang menciptakan Kapitalisme Global. Terminologi yang sama, penekanannya adalah ekonomi.

Selanjutnya, jika pendekatan Levitt, Russell, dan IMF, menyebut periode ini

⁸ Manfred B. Steger, 2005, *Globalisme, Bangkitnya Ideologi Pasar*, Terjemahan, (Jakarta: Lafadl Pustaka).

sebagai Era Globalisasi. Pemikir HI dari Asia, Adi Rio Arianto memberikan cara pandang terbaru mengenai lingkungan strategis yang jauh lebih kompleks dengan menawarkan istilah “Abad Horizontal” atau “Era Horizontal”⁹ untuk menggambarkan periode dunia Abad ke-21 sejak dunia memasuki tahun 2000. Dalam tulisannya “Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad ke-21”, Arianto menyebut periodisasi dunia sedang memasuki Era Horizontal. Ia merujuk pada perkembangan wilayah lingkungan strategis dalam 8 (delapan) medan/ dimensi dunia, yaitu darat, udara, laut, bawah tanah, serta empat medan geometri atau volume, yaitu ruang hampa, galaksi, siber, dan khatulistiwa.¹⁰ Ia menyodorkan evolusi terakhir dari pembangunan sistem keseimbangan, kekuatan, dan keamanan negara-bangsa abad ke-21 yang ia sebut sebagai “Geometripolitika atau Teorema Arianto” melampaui Politik dan Geopolitik yang berujung pada pembentukan arsitektur keamanan dunia Era Horizontal.¹¹ Medan siber dan khatulistiwa adalah penekanannya.

Selain itu, Arianto menekankan bahwa stabilitas dunia Era Horizontal Abad ke-21 dibangun berdasarkan

⁹ Adi Rio Arianto, “Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa; Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21”, Prosiding Konvensi Nasional VII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), 2016, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21-22.

asumsi-asumsi dasar ilmu Matematika, kaitannya dengan evolusi Ilmu Politik dan Ilmu Geopolitik. Ilmu Geometripolitika adalah evolusi terakhirnya. Dengan demikian, Arianto memperkenalkan Ilmu Geometripolitika yang membagi wilayah dunia menjadi delapan dimensi di atas.¹² Ia juga menekankan bahwa memasuki dekade kedua Abad ke-21, gambaran keamanan universal antarmanusia mencerminkan manifestasi dari kekuatan universal yang dihasilkan oleh hubungan antara manusia dan teknologi paling mutakhir di Abad ke-21, yaitu teknologi siber dan senjata nuklir. Dengan demikian, penekanan yang digunakan oleh Arianto dalam menggambarkan lingkungan strategis abad 21 yang disebut dengan “Era Horizontal” adalah mengarah pada terminologi strategi dan keamanan dunia. Lebih kompleks dibandingkan term ekonomi.

Namun demikian, untuk mengimbangi aspek lainnya, Arianto mengangkat istilah “Globalinium”¹³ sebagai aspek yang lebih universal dalam mengimbangi pengaruh dari “Globalisasi”. Globalinium merujuk pada 3 (tiga) kata, yaitu, Global, Horizontal, dan Milenium.¹⁴ Global adalah menggambarkan dimensi wilayah; Horizontal adalah menggambarkan istilah negara-negara yang dilewati oleh Horizon (Garis) Khatulistiwa terpanjang di dunia, yaitu Indonesia; adapun, Milenium adalah waktu 1000 tahun pasang surut

¹² *Ibid.*, hlm. 21-22.

¹³ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

periodisasi kehidupan manusia.¹⁵Dengan demikian, Era Horizontal adalah Era dimana manusia hidup pada hari ini sejak tahun 2000 yang akan terus berproses pada abad ke-21, abad ke-22 sampai abad ke-28 (yang berjarak 7 abad), dan seterusnya. Inilah salah satu aspek bela negara di Abad ke-21, dimana aspek Politik, Geopolitik, dan Geometripolitik akan menjadikan negara lebih hati-hati dalam memosisikan diri di Era ini. Dengan demikian peran negara secara mayor dan minor mengalami evolusi. Dalam aspek bela negara terutama di sektor pemikiran, negara telah berbagi peran dengan Universitas dalam mengembangkan pemikiran bela negara di lingkungan akademik. Itu sebabnya, universitas perlu menempati satu posisi secara khusus sebagai subyek dan/obyek baru dalam studi HI.

Dengan beberapa pertimbangan di atas, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa aspek bela negara memiliki pengaruh signifikan dalam kemajuan studi HI, yaitu: pertama, dari sisi aktor, bahwa selain negara, universitas adalahsalahsatucalon‘akanmenjadi’aktor HI; kedua, dari sisi pendekatan, bahwa pendekatan Horizontalisme mampu menciptakan ‘moralisasi manusia’ dalam usaha bela negara. Hal ini diidentifikasi melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) aspek bela negara menuntut peran sentral (mayor) dan peran sektoral (minor) negara sebagai subyek HI dimana negara berbagi peran dengan universitas dalam usaha ‘produksi pemikiran bela negara’,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

(2) aspek bela negara mempengaruhi pendekatan Nir-Horizontal (Realisme, Liberalisme, dan lain-lain) dengan perilaku anarkisnya bergeser ke pendekatan ‘Horizontalisme’ dengan perilaku taat dangotong-royongnya, (3) aspek bela negara menuntut perubahan lingkungan strategis dari Era Global (Globalisasi) ke Era Horizontal (Horizontalisasi) atau dengan istilah “Globalinium”, dan (4) usaha bela negara menjadi krusial saat disandingkan dengan kepentingan nasional di pentas Internasional dimana negara dan universitas berbagi peran untuk mencapai kepentingan dimaksud.

Persinggungan antara Bela Negara dan Ilmu Hubungan Internasional

Diskusi tentang aspek bela negara dalam Disiplin HI sangat minim, bahkan hampir tidak ada satupun Ilmuwan HI yang mendalami keterkaitan antara studi bela negara dan HI. Meskipun demikian, negara merupakan salah satu aspek paling luas yang menjadi kajian dari aktor-aktor HI. Perdebatan tentang berkembangnya aktor HI juga turut mewarnai apakah peran sentral negara masih bisa efektif atau malah sebaliknya. Dewasa ini aktor HI tidak hanya melibatkan negara saja, namun telah melibatkan aktor-aktor non-negara, seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kota, grup, kalangan epistemik, dan individu. Karena studi ini ingin mengkaitkan aspek bela negara dan peranan negara dalam menopang interaksi internasional, maka peran aktor

negara dan non-negara dalam HI perlu diperjelas. Dalam melakukan interaksi tersebut, suatu negara tentu saja memiliki pelaku atau aktor-aktor yang bertugas dan berperan untuk menjalankan interaksi tersebut. Siapa sajakah yang di maksud dengan aktor-aktor tersebut?

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, aktor-aktor tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu negara dan non-negara. “Aktor yang paling penting dalam HI adalah negara. Negara adalah sebuah kesatuan dari beberapa populasi penduduk yang diatur dan di kontrol oleh suatu pemerintahan.”¹⁶ Negara merupakan pelaku utama dalam melakukan interaksi hubungan internasional. Hal ini karena negara merupakan aktor dan penggerak utama untuk menjalankan interaksi-interaksi antar satu negara dengan yang lain. Saat melakukan interaksi-interaksi tersebut, negara-negara melakukan kerjasama dan bersekutu dengan negara lain untuk membentuk suatu kelompok antarnegara yang memiliki suatu kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam melakukan hal ini, suatu negara harus memiliki kedaulatan. Syarat kedaulatan suatu negara haruslah memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, dan diakui kemerdekaannya oleh negara-negara di dunia.

Dalam melakukan kerjasama, negara membutuhkan peran negara serta peran dari aktor non-negara. Aktor non-negara bertugas untuk melengkapi dan membantu kinerja dari negara itu sendiri.

¹⁶ Joshua S. Goldstein, *International Relations*, (London: Pearson/Longman, 2005).

Dalam aktor non negara terdapat 3 tipe : “*Intergovernmental Organizations (IGOs), Non governmental Organizations (NGOs), dan Multinational Corporations (MNCs)*”.¹⁷ Tipe tipe pelaku non-negara tersebut memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku hubungan internasional. Pertama, IGOs merupakan aktor organisasi internasional yang berhubungan dan dikelola oleh pemerintah dan berperan mewakili suatu negara. “Organisasi ini memfasilitasi kerjasama antar negara-negara dalam melaksanakan tugas yang melampaui batas nasional”.¹⁸ Contoh dari IGOs adalah organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diciptakan untuk menegakkan perdamaian dunia. Selain PBB, ada pula organisasi ASEAN yang tercipta untuk menjalankan interaksi antar negara Asia Tenggara dan bertujuan untuk memajukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kedua, yakni NGOs. NGOs merupakan aktor organisasi internasional yang dibentuk dan tidak terkait oleh pemerintahan dan tidak mewakili suatu negara. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ekonomi, terorisme¹⁹, agama, ekosistem, dan lain sebagainya dalam dunia internasional. “Organisasi ini bersifat transnasional dan menarik

¹⁷ Dean A. Minix & Sandra M. Hawley, *Global Politics*, (US: West/Wadsworth, 1998).

¹⁸ Conway W. Henderson, *International Relations, Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st Century*, (London: McGraw-Hill International Edition, 1998).

¹⁹ Charles W. Jr. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics, Trend and Transformation*, 6th edition, (US: St. Martin's Press 1997).

keanggotaan dari individu dan asosiasi swasta yang berlokasi di beberapa negara”.²⁰Ketiga, adalah MNCs. MNCs merupakan aktor organisasi internasional yang berperan dalam bidang sosial dan permasalahan ekonomi. Organisasi ini biasanya berbentuk atau beranggotakan perusahaan-perusahaan multinasional yang tidak hanya ada dalam satu negara saja, tetapi juga tersebar di banyak negara di seluruh dunia. MNCs mempunyai peranan penting dalam hal ekspor dan impor. Pada akhirnya, semua aktor HI, baik negara dan non-negara memiliki peran dan fungsi. Negara tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lain karena semua negara dibentuk pada dasarnya saling terkait dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

Aktor Utama dalam Bela Negara dan Moralisasi Manusiannya: Negara Vs. Universitas

Negara dan universitas merupakan aktor dominan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi dalam usaha bela negara. Dalam satu sisi, negara lah yang menciptakan universitas. Di sisi lain, universitas memiliki posisi independen terhadap negara dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Penekanannya di sini adalah pendidikan bela negara untuk memperkuat usaha bela negara.

Penelitian ini menemukan bahwa, di universitaslah konsep-konsep bela

negara diciptakan dan dikembangkan. Oleh karena itu, menjadi wajar jika konsep bela negara pada akhirnya dapat diartikan secara fisik dan non fisik. ”Negara dan universitas berbagi peran mayor dan minornya. Dalam artian, secara fisik, negara mengambil peran dominan dalam usaha bela negara misalnya mengangkat senjata menghadapi agresi musuh, sedangkan secara non-fisik universitas mengambil peran dominan dalam usaha bela negara melalui pendidikan bela negara, atau disebut dengan ’moralisasi manusia’ di sektor bela negara.” Secara non fisik bela negara didefinisikan sebagai upaya mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan. Sumber daya manusia menjadi titik sentral dalam pembangunan. Persoalannya sekarang adalah siapa yang berwenang dalam usaha menciptakan sumber daya manusia dan kualitasnya? Bagaimana sumber daya manusia bisa diarahkan untuk meningkatkan usaha-usaha bela negara di luar upaya militer/wajib militer? Jawabannya adalah Lembaga pendidikan, yaitu ”Universitas.”

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban harus sejalan, hak-hak yang telah diberikan oleh negara harus disertai pemahaman dan kesadaran akan kewajiban yang dilakukan oleh warga negara dan hak yang diatur oleh negara juga harus memberikan ruang kesadaran

²⁰ *Ibid.*

bagi warga negara untuk menunaikan kewajibannya. Pencerdasan kehidupan bangsa sebagai amanat UUD 1945 harus dijabarkan secara arif, dan universitas serta lembaga pendidikan di bawahnya punya andil besar dalam mencapai hal di atas. Kecerdasan kehidupan bangsa tidak hanya dalam arti fisik atau material, tetapi juga psikis dan spiritual, artinya bahwa proses mencerdaskan dalam konteks keilmuan dimana proses pencerdasan tersebut lebih banyak terjadi di universitas, harus bisa dibarengi dengan proses mencerdaskan watak kebangsaan sebagaimana diamalkan dalam pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang hendak mencerdaskan kehidupan kebangsaan, dilakukan dengan menanamkan kesadaran tentang identitas, karakter dan integritas, serta jati diri bangsa. Peran tersebut sesungguhnya selama ini diambil alih oleh universitas dalam bentuk penyampaian kurikulum dan riset terkait pemikiran bela negara. Pemikiran tersebut lebih jauh akan mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam usaha bela negara.

Kesadaran bela negara merupakan sikap moral dan implementasi profesionalisme, sehingga dalam aktualisasinya mampu menjadikannya sebagai unsur utama kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman militer. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya untuk menumbuhkan sikap perilaku belanegara yang mencakup pembangunan sikap moral dan watak bangsa serta pendidikan politik kebangsaan melalui

universitas. Universitas punya andil besar dalam usaha pembangunan sikap moral dan watak bangsa yang nantinya mampu memberikan ikatan dasar yang dapat mendukung ide kewarganegaraan tersebut, memberikan arahan sikap dan perilaku karena dapat memberikan kerangka orientasi nilai. Orientasi nilai yang dilandasi nilai-nilai komunal (nilai-nilai kebangsaan) yang disepakati merupakan ikatan maya, yang jika tertanam dalam sanubari tiap warga negara justru dapat mengikat kuat karena menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, universitas telah mengambil alih peran negara dalam bentuk moralisasi manusianya untuk memperkuat usaha bela negara secara non-fisik.

Bela Negara dan Perkembangan Pendekatan dalam Studi HI: Pendekatan Nir-Horizontal, Negara dan Nilai-Nilai 'Anarkis' dan 'Bebas'nya

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai

kekuatan pertahanan dan di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari berbagai ancaman internal dan eksternal negara, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan mekanisme pertahanan negara. Adapun, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.

Dalam UUD 1945, tercantum tujuan nasional Indonesia yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan (memajukan kesejahteraan umum), tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi).²¹ Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.²² Kesadaran bela negara hakikatnya kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras.

Untuk menganalisis usaha bela negara, perlu untuk mendalami model dan

²¹ Budi Susilo Soepandji. *Bangga Indonesia Menjadi Komponen Cadangan Tanah air*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm, 34-35.

²² Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

perilaku negara dari berbagai pendekatan. Beberapa pendekatan Nir-Horizontal yang paling berpengaruh, diantaranya adalah Realisme dan Liberalisme. Realisme menekankan pada keamanan negara. Semua negara mencari kekuasaan, meningkatkan kekuatannya dan mencapai kepentingan nasionalnya. Bela negara dalam hal ini adalah mempertahankan wilayah fisik negara.

Realisme bermula dari pemikiran Thucydides, sejarawan yang mengemukakan paham Realis yang terjadi saat Perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta dan juga berasal dari pemikiran-pemikiran para pelopornya seperti Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), Hans Joachim Morgenthau (1948). Thucydides membenarkan hal dalam dialog Melian bahwa adanya kaum yang kuat dan lemah, sementara yang kuat berkuasa dan yang lemah menderita. Thucydides juga menjelaskan perilaku kaum Athena dengan kekuasaannya yang ingin menguasai suatu wilayah sehingga perang tak bisa dihindarkan. Pemikiran lain oleh para tokoh seperti Machiavelli, Hobbes, Morgenthau, intinya beranggapan sama bahwa kekuasaan dan keamanan merupakan hal yang utama bagi negara. Paham realis bertentangan dengan paham liberalis. Dimana realis mengutamakan power dan pertahanan negara, sedangkan liberalis mengutamakan kebebasan dan keeratatan hubungan aktor non-state (organisasi non pemerintah, multinational corporations, dan sebagainya) untuk mendapatkan keuntungan melalui

kerjasama. Liberalisme menganggap bahwa paham realis tidak dapat menjelaskan adanya ide keseimbangan kekuasaan (kedaulatan) di zaman kuno.

Tanggapan paham liberal ini memunculkan paham realis klasik di abad ke-21 (1939) dipublikasikan oleh Edward Hallet Carr karena banyak sejarawan yang tidak setuju pada liberalisme. Paham realis klasik ini intinya menginginkan agar negara mampu meningkatkan kemampuan manusia karena paham ini beranggapan bahwa kekuasaan berakar dari kemampuan manusia. Realisme klasik menjelaskan perilaku konfliktual oleh kelemahan manusia dan dicirikan dengan politik internasional yang buruk karena adanya keburukan dalam membuat kebijakan luar negeri. Realisme klasik meningkat pada tahun 1960-an lalu bermunculan pendukung-pendukung baru paham ini di tahun 1970-an dengan adanya pendekatan tradisional untuk penyelidikan.

Paham realisme direvisi dengan adanya teori politik Internasional oleh Kenneth Waltz (1979) dengan sebutan Neorealisme. Realisme klasik maupun neorealisme masih dalam konteks kekerasan dalam mencapai kekuasaan. Namun realisme klasik lebih menekankan hakikat atau keinginan negara dalam berkuasa sedangkan neorealisme menekankan pada perilaku agresif negara yang anarki. Perbedaan lain realisme klasik berasumsi bahwa pemimpin negara didorong oleh nafsu mereka akan kekuasaan, sedangkan neorealisme

berasumsi minimal menyatakan untuk berusaha bertahan hidup. Menurut Waltz, perilaku negara dapat dijadikan produk dari persaingan antar negara, karena dinilai menguntungkan bagi mereka. Dalam neorealisme ini, memungkinkan adanya kerjasama dalam anarki namun relatif, karena tidak ada jaminan atau kepastian dalam kerjasama, jadi bisa diuntungkan bisa dirugikan. Terutama pada negara yang memiliki power yang kuat atau adikuasa, mereka akan merasa diuntungkan oleh kerjasama tersebut. Tanggapan dari paham neorealisme kemudian muncul paham realisme neoklasik. Paham ini lebih menonjolkan keseimbangan kepentingan dan menekankan pada status quo dan negara revisionis serta kekuasaan.

Selain itu, pendekatan realisme struktural defensif yang berasumsi pada motivasi negara. Sama halnya dengan neorealis, realis struktural defensif menjelaskan bahwa negara-negara mencari keamanan dalam sistem internasional anarkis karena dianggap bahwa ancaman datang dari negara lain. Realis struktural defensif lebih mengandalkan pilihan rasional, menambah keseimbangan pelanggaran pertahanan karena keadaan geografis dinilai menguntungkan pertahanan lalu menggabungkan keduanya sebagai pendukung pertahanan. Realis struktural defensif menyatakan harus mendukung status quo. Untuk menjelaskan konflik, realis struktural defensif harus menarik faktor domestik (yang berada diluar teori mereka) atau seolah-olah mereka adalah revisionis.

Teori Mearsheimer (ofensif neorealisme) berasumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis; kekuatan besar memiliki kemampuan militer ofensif; negara tidak pernah yakin dengan perilaku negara lain karena dianggap sama-sama merusak satu sama lain; kelangsungan hidup merupakan tujuan utama dari kekuatan besar; dan power merupakan aktor rasional. Mearsheimer menyimpulkan bahwa mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri untuk keamanan mereka dan strategi yang terbaik bagi kelangsungan hidup negara adalah memaksimalkan kekuasaan relatif. Perbedaannya dengan realis struktural defensif bahwa negara mencari jumlah kekuasaan yang tepat, sedangkan Mearsheimer berpendapat bahwa keamanan membutuhkan banyak daya untuk memperoleh kekuasaan relatif. Dari definisi, sejarah, serta teori-teori yang menjelaskan tentang pemikiran realis dapat disimpulkan bahwa negara sebagai hal yang terpenting dan diutamakan dalam HI dan bagaimana negara menyediakan pertahanan dan keamanan bagi negaranya itu dengan memaksimalkan power. Dengan demikian, untuk membela negara, negara-negara ini cenderung berhaluan militer, melupakan persoalan moralisasi dalam usaha bela negara.

Bela Negara dan Perkembangan Pendekatan dalam Studi HI: Pendekatan Horizontalisme, Negara dan Nilai-Nilai 'Ta'at' dan 'Gotong-Royong'

Dalam pandangan Realisme, telah diketahui siapakah yang sebenarnya

melakukan anarki. Manusia realism bersandar pada 'anarkisme' dan 'kebebasan', sedangkan manusia Horizontalisme bersandar pada 'ta'at' dan 'gotong-royong'.²³ Realisme percaya bahwa anarki dilakukan oleh negara-negara yang percaya pada sistem internasional Westphalia. Sedangkan, Horizontalisme percaya bahwa gotong-royong dilakukan oleh negara-bangsa yang taat pada nilai-nilai hubungan antarbangsa yang bersifat gotong-royong.

Perjanjian Damai Westphalia terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di dua kota di wilayah Westphalia, yaitu di Osnabrück (15 Mei 1648) dan di Münster (24 Oktober 1648). Kedua perjanjian ini mengakhiri Perang 30 Tahun (1618-1648) yang berlangsung di Kekaisaran Romawi Suci dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah: (1) Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa; (2) Perjanjian perdamaian

²³ Untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang "Globalinium", lihat Adi Rio Arianto, Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa; Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad ke-21", Prosiding Konvensi Nasional VII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), 2016, hlm. 18.

mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci; (3) Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing; dan (4) Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakikat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrecht yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Adapun karakter dari Masyarakat Internasional adalah: (1) Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat; (2) Hubungan nasional didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat; (3) Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja; (4) Hubungan antarnegara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil alih pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi; (5) Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara

tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini; (6) Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional; dan (7) Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin *bellum justum* (ajaran perang suci) ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

Hal di atas telah membuktikan bahwa Perjanjian Westphalia muncul untuk mengubah model hubungan dunia. Ia sengaja menciptakan negara-negara sebagai alat untuk memecah-belah bangsa-bangsa besar di dunia. Ia datang untuk memperlemah keberadaan Bangsa Horizontal. Dengan kata lain, teori HI yang paling terakhir, yaitu Post-Kolonialisme datang untuk memetakan negara-negara baru yang usianya lebih muda. Post-Kolonialisme datang untuk menyederhanakan bentuk “bangsa” menjadi bentuk “negara.” Dalam Hubungan Antarbangsa, semakin muda umur sebuah bangsa, akan semakin rentan dengan penjajahan. Dengan demikian, inti dari Perjanjian Westphalia adalah menjajah bangsa-bangsa dalam bentuk negara-negara kecil. Lantas, sampai kapan proses ini berjalan? Harus kah proses ini dikembalikan? Menurut hemat penulis memang mesti dikembalikan. Sebenarnya, proses tersebut merupakan sebuah proses yang akan terus bergerak menuju titik puncaknya. Horizontalisme percaya, titik puncak tersebut

berlangsung selama tujuh abad atau 700 tahun. Dengan demikian, maka proses pembalikan model hubungan antarmanusia di dunia sudah memasuki era sebaliknya, yaitu perubahan hubungan dunia dari “Sistem Internasional yang bersifat anarki” menuju “Hubungan Antarbangsa yang bersifat gotong-royong.” Itulah permulaan Abad pertama Era Horizontal pada abad ke-21. Era Horizontal melegitimasi kekuatan negara-negara Asia, Eurasia, dan Afrika dalam pembentukan kepemimpinan universal.

Bela Negara dan Disiplin Baru dalam Studi HI: Horizontalisme dan Kepentingan Indonesia di Arena Internasional

Setelah memahami peran Indonesia sebagai salah satu subyek HI, selanjutnya adalah menelaah posisi Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai bela negara untuk disampaikan ke dunia Internasional. Dalam hal ini, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingannya di arena internasional. Dengan menggunakan sudut pandang Horizontalisme, setidaknya kepentingan Indonesia bisa terbaca oleh negara lain. Dengan demikian, negara lain akan mencari posisi yang aman bagi pelaksanaan kepentingan nasionalnya disesuaikan dengan kemampuannya.

Indonesia butuh kendaraan. Globalinium²⁴ merupakan sebuah istilah khusus sebagai “kendaraan”

²⁴ Untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang “Globalinium”, lihat Adi Rio Arianto, *op.cit.*

yang diangkat untuk mempengaruhi pembangunan global masa depan. Globalinium yang dipandu oleh pemikiran Horizontalisme berusaha untuk menciptakan kemakmuran Bangsa Horizontal. Dengan demikian, hubungan antara Globalinium dan Horizontalisasi Global tidak akan terpisah, melainkan keduanya bersatu dan bersama-sama membangun Indonesia dan negara-negara Horizontal lainnya dibawah satu naungan perspektif global, yaitu Horizontalisme. Horizontalisasi dunia akan terus bergerak menuju medan pembangunan Indonesia di Milenium ke-3. Menurut kalender Masehi, dunia telah memasuki Milenium ke-3 atau “dunia sedang menuju pada tahun 3.000-an.” Milenium ke-3 ini disebut sebagai Era Horizontal dengan titik acuan awalnya pada tahun 2000. Hal ini mengingatkan Horizontalisasi dunia tengah berjalan yang telah dimulai sejak tahun 2000 silam. Hal ini sekaligus menandai secara ilmiah titik acuan bagi permulaan Era Horizontal pada abad ke-21. Sekaligus menandai kelahiran Filsuf Horizontalisme Abad ke-21.

Dalam mengkawal penguatan posisi Indonesia di level internasional, usaha bela negara oleh Universitas dapat dilakukan melalui pendirian dan penguatan cara pandang HI dari sudut pandang keindonesiaan melalui penciptaan Jurnal dan pendirian pusat studi di Universitas. Universitas memiliki orientasi penuh dan berkarakter “bela negara” yang secara strategis berada di pusat Ibukota Jakarta. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan manakala universitas

bisa menjadi aktor HI yang berperan penting dalam usaha bela negara abad ke-21. Terutama memaksimalkan peran universitas sebagai aktor HI, berbagi peran dengan negara.

Itulah sebabnya “sudut pandang” Indonesia: “Horizontalisme” lahir di universitas dalam usaha bela negara melalui: (1) melalui pendidikan bela negara di universitas, bisa terbangun cara pandang keindonesiaan “Horizontalisme” dalam menilai konstalasi Antarbangsa; (2) melalui pendidikan bela negara di universitas, bisa terkawal arah dan terjaga konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan melalui instrumen institusional universitas (kurikulum, jurnal, dan pusat studi), teoritikal (ide), dan praktikal (riset); dan (3) melalui pendidikan bela negara, pembelaan kepentingan bangsa Indonesia dan negara-negara Horizontal lainnya di level nasional, internasional, regional, global, antarbangsa, dan universal dapat dilakukan secara strategis dengan cara mengembangkan konsep-konsep pemikiran bela negara melalui maksimalisasi peran universitas dalam membentuk moral atau “moralisasi” manusia Indonesia secara menyeluruh.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa aspek bela negara memiliki pengaruh signifikan dalam kemajuan studi HI, yaitu: pertama, dari sisi aktor, menemukan bahwa selain negara, universitas adalah salah satu calon ‘akan menjadi’ aktor HI; kedua, dari

sisi pendekatan/ paradigma, menemukan bahwa pendekatan Horizontalisme mampu menciptakan ‘moralisasi manusia’ dalam usaha bela negara. Penelitian ini berkesimpulan: pertama, aspek Bela Negara mempengaruhi kemajuan Disiplin HI melalui studi mendalam tentang pemilahan peran sentral (mayor) dan peran sektoral (minor) negara sebagai subyek HI dimana negara berbagi peran dengan Universitas dalam usaha ‘produksi pemikiran bela negara’; kedua, aspek Bela Negara mempengaruhi perkembangan pendekatan dalam Studi HI yang tadinya aspek Bela Negara hanya berkuat pada pendekatan Nir-Horizontal (Realisme, Liberalisme, dan lain-lain) dengan perilaku anarkis dan bebasnya bergeser ke pendekatan Horizontalisme dengan perilaku taat dan gotong-royongnya; ketiga, telah terjadi evolusi peran negara sebagai aktor HI diikuti dengan evolusi lingkungan strategiknya, yaitu dari Era Global (Globalisasi) ke Era Horizontal (Horizontalisasi) yang dalam hal ini disebut dengan istilah “Globalinium”; dan, keempat, usaha bela negara menjadi krusial saat disandingkan dengan kepentingan nasional di pentas Internasional dimana negara dan universitas berbagi peran untuk mencapai kepentingan dimaksud.

Daftar Pustaka

Buku

- Goldstein, Joshua S. 2005. *International Relations*. London: Pearson/Longman.
- Henderson, Conway W. 1998. *International Relations, Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st Century*. McGraw-Hill International Edition. New York and London: McGraw-Hill Publishers.
- Kegley, Charles W. Jr., dan Eugene R. Wittkopf. 1997. *World Politics, Trend and Transformation*, 6th edition. St. New York: Martin's Press.
- Minix, Dean A. dan Hawley, Sandra M. 1998. *Global Politics*. US: West/Wadsworth, 1998.
- Steger, Manfred B. 2005. *Globalisme, Bangkitnya Ideologi Pasar*. Terjemahan. Jakarta: Lafadl Pustaka.
- Soepandji, Budi Susilo. 2010. *Bangga Indonesia Menjadi Komponen Cadangan Tanah air*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Subagyo, Agus. 2015. *Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Banten: Graha Ilmu

Prosiding

- Arianto, Adi Rio. 2016. "Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa; Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad ke-21". Prosiding Konvensi Nasional VII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII).

Website

- CBC Digital Archives "Seeking Sanctuary: Draft Dodgers", dalam http://archives.cbc.ca/war_conflict/vietnam_war/topics/348/ diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.
- Feder, Barnaby J, "Theodore Levitt, 81, Who Coined the Term 'Globalization', Is Dead" (6 July 2006), dalam <http://www.nytimes.com/2006/07/06/>

business/06levitt.html diakses pada 20 Agustus 2017.

- NU.nl, "Suriname voert dienstplicht weer in", 1 oktober 2010, dalam <http://www.nu.nl/buitenland/2346876/suriname-voert-dienstplicht-weer-in.html>, diakses pada 20 Agustus 2017.
- Russel, Charles Taze, "The Battle of Armageddon, October 1897 pages 365-370" (Oktober 1897), dalam <http://www.pastor-russell.com/volumes/V4/v04s07.php>, diakses pada 20 Agustus 2017.
- Tohir, "Konsep Bela Negara Di Indonesia", dalam <http://chyrun.com/konsep-bela-negara-di-indonesia/tanggal>, diakses pada 7 Agustus 2017.